

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD DKI Ungkap Banyak KJP Disalahgunakan

◆ Buat Bayar Cicilan Kendaraan

JAKARTA (Poskota) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengungkap banyak KJP yang disalahgunakan oleh orangtua murid untuk menyicil kendaraan.

Bahkan KJP banyak disalahgunakan oleh siswa itu sendiri untuk foya-foya dengan membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah.

"Karena kondisi sekarang KJP itu banyak dipakai orang tua, bahkan untuk cicilan motor, untuk anaknya malah foya-foya, itu banyak terjadi," kata Ima kepada wartawan, Kamis (7/11).

"Itu yang sedang kita mendidik masyarakat bahwa sebenarnya KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar untuk menunjang mereka di pendidikan," sambungnya.

Ima menuturkan jika banyak KJP yang ternyata salah sasaran. Bukannya digunakan untuk kebutuhan sekolah malah digunakan untuk kebutuhan lain.

"Antara lain justru mereka pakai KJP bukan untuk sekolah, untuk hal yang lain sebagainya. Maka itu kita harus tarik belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis,"

tukasnya.

KJP ini berkaitan dengan program sekolah swasta gratis yang sampai saat ini mekanismenya masih dalam tahap pembahasan mendalam.

Namun demikian, politisi PDIP ini menegaskan jika program sekolah swasta gratis menyasar kepada orang yang tidak mampu.

"Karena kalau anak mampu ya sudah dibiayai oleh orang tuanya, tapi kalau anak yang tidak mampu itu yang jadi prioritas kita. Karena kita harus menjalankan keadilan sosial," jelasnya.

Untuk melihat program ini tepat sasaran, Ima menyebut nantinya program sekolah swasta gratis ditujukan bagi warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Adapun target sekolahnya merupakan sekolah swasta yang mau diajak bekerjasama, diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang berada di permukiman.

"Yang pasti pertama, sekolah tersebut memang wilayah swasta padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susah," tandasnya. **(Pandi/den)**